

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 1 maka jawaban atas rumusan masalah dan juga kesimpulan dari penelitian tentang “Respon FSPMI Terhadap Kebijakan Pemagangan (Studi FSPMI Kota Tangerang). Terdapat berbagai respon dan 3 resistensi dari FSPMI Kota Tangerang terhadap kebijakan pemagangan yaitu, ditemukan beberapa respon dan 3 resistensi yang dilakukan oleh para buruh yang ada didalam FSPMI Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Respon.

- Menolak system pemagangan karena pemagangan dipersepsikan sebagai wadah bagi para pelajar untuk mencari ilmu dan pengalaman dalam bekerja akan tetapi mereka justru dipekerjakan sebagai pekerja yang upahnya jauh dari standar kesejahteraan para pekerja pada umumnya.
- Menolak kebijakan pemagangan karena didasarkan pada peraturan perusahaan yang menempatkan para pekerja magang pada bidang produksi sehingga hal ini menjadi kontradiktif dengan pekerja lainnya.
- Menolak karena pemagangan didalam penerapannya banyak terjadi ketidaksesuaian seperti dalam pembagian upah yang

diterima oleh pekerja magang tidak sesuai dengan pekerja tetap/kontrak meskipun dalam posisi bidang pekerjaan dan resiko pekerjaan yang sama.

- Menolak karena didalam program pemagangan ini tidak memiliki nilai kesejahteraan yang layak bagi para pekerja

magang karena didalam penerapannya justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan tenaga kerja dengan bayaran upah yang minim.

- Menolak terhadap penerapan pemagangan yang dilakukan oleh perusahaan karena didasarkan pada lepasnya tanggung jawab para perusahaan yang menerapkan pemagangan terhadap jaminan-jaminan bekerja para pekerja magang.

- Menolak system pemagangan karena para pekerja magang menjadi rentan sekali mengalami pemutusan kerja apabila melawan aturan yang diberikan oleh perusahaan sehingga menyebabkan para pekerja magang mudah sekali untuk di intervensi oleh pihak perusahaan untuk menjalankan segala aturan yang berlaku termasuk melarang pekerja magang untuk berserikat.

- Menolak kebijakan pemagangan karena pemagangan memiliki potensi menggusur keberadaan para pekerja tetap dan kontrak.

- Menolak pemagangan yang didasarkan pada penempatan pekerja magang pada bidang produksi yang memiliki tingkat

resiko yang lebih tinggi tanpa adanya jaminan keselamatan kerja.

- Menolak terhadap kebijakan pemagangan karena menimbulkan ketimpangan dari sisi pendapatan yang dialami oleh pekerja magang sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam menjalani kehidupan.

2. Resistensi yang dilakukan FSPMI.

Resistensi terbuka :

- Melakukan penolakan dengan cara aksi-aksi kepada DPR RI/Pemerintah.
- Melakukan penolakan dengan cara menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemagangan.
- Melakukan unjuk rasa serta mogok kerja serta memberikan aspirasi mengenai strategi terkait dengan program pemagangan yaitu membuat regulasi yang dapat mengadopsi aspirasi kepastian hubungan kerja baik karyawan kontrak/tetap maupun pekerja magang.



Resistensi terselubung :

- Negosiasi untuk mencari win-win solution.
- Mengontrol dan menanyakan legalitas seputar dokumen resmi tenaga magang.
- Memberikan konsep dan lobi-lobi kepada dinas tenaga kerja setempat agar tidak semua jenis lapangan pekerjaan itu dilegalkan untuk magang.

Resistensi tidak disadari :

- Melakukan kampanye-kampanye melalui media sosial yang sebenarnya dilakukan oleh para buruh untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan mereka bekerja disuatu perusahaan akan tetapi hal itu dianggap oleh perusahaan sebagai bentuk perlawanan.

5.2 Saran

1. Untuk perusahaan yang masih menerapkan sistem pemagangan harus bisa menempatkan para pekerja magang ditempat yang sesuai dengan aturan UU agar terhindar dari penyimpangan yang bisa menimbulkan suatu perlawanan didalam sebuah perusahaan yang dilakukan oleh para pekerja kontrak/tetap yang telah lebih dahulu bergabung di perusahaan tersebut.

2. Diharapkan pemerintah mampu mengawasi secara ketat dan menyeluruh kepada para perusahaan yang menerapkan sistem pemagangan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sistem pemagangan disebuah perusahaan.



